

## Kontribusi dan Efektivitas PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Selatan

**Erza Fakhur Rozi\*, Saipudin**

Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat  
[\\*erza.rozi@gmail.com](mailto:*erza.rozi@gmail.com)

### **Abstract**

*These studies are targeted or targeted: 1) To find out the level of effectiveness of local revenue sources and the balancing fund against the regional budget (APBD) from 2018-to 2014, 2) To find out the contribution of the sources of local revenue and the balanced fund to the regional budget. ) from 2018-to to 2014.*

*This study and study can be considered a qualitative descriptive study and study. Data was collected through documentation and a literature study.*

*The results of the assessment and study showed: 1) The Level of Effectiveness of Regional Original Revenue of South Kalimantan Province in 2014-2018 ranged from 88.38- to 100.80 percent, and the average annual rate was 86.37 percent in the EFFECTIVE category. Level of Effectiveness of the South Kalimantan Provincial Balance Fund in 2014-2018, ranging from 98.59-105.25 percent and an average annual of 101.96 percent with a VERY EFFECTIVE category, 2) PAD contributions to the APBD from 2014-2018, ranging from 44.84 - 52.95 percent with an annual average of 49.35 in the GOOD category. The contribution of the Balancing Fund to the Regional Budget from 2014-to 2018 ranged from 33.55-to 48.11 percent, with an annual average of 41.69 percent in the ENOUGH category.*

**Keywords :** *Contribution and Effectiveness, Local Own Revenue, Balancing Fund, Regional Revenue and Expenditure Budget, Qualitative Descriptive.*

### **Abstraksi**

Erza Fakhur Rozi (2020), Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengkajian dan penelaahan ini bertarget atau sasaran: 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2018-2014, 2) Untuk mengetahui sumbangan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2018-2014.

Pengkajian dan penelaahan ini dapat dianggap sebagai pengkajian dan penelaahan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil pengkajian dan penelaahan menunjukkan: 1) Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018, berkisar 88.38-100,80 persen dan rata-rata pertahunnya 86.37 persen dengan kategori EFEKTIF. Tingkat Efektivitas Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018, berkisar 98.59-105.25 persen dan rata-rata pertahunnya sebesar 101,96 persen dengan kategori

SANGAT EFEKTIF, 2) Sumbangan PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar sebesar 44.84 - 52.95 persen dengan rata-rata pertahunnya sebesar 49,35 dengan kategori BAIK. Sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar 33.55-48.11 persen dengan rata-rata pertahunnya sebesar 41.69 persen dengan kategori CUKUP.

**Kata Kunci :** Kontribusi dan Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Deskriptif Kualitatif.

## PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah masa kini, daerah diserahkan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus perihal masalah daerahnya sendiri dalam pengelolaan aktifitas daerah. Maka sebab itu, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk aktifitas pembangunan daerah. Target atau sasarannya untuk lebih mendekatkan pengayoman pemerintah kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mengamati serta mengendalikan aktivitas penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bisa diibaratkan sebagai sumber pemasukan yang signifikan bagi pendanaan rutin dan pembangunan di sebuah daerah otonom. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang, pemasukan daerah berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Merujuk kepada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dapat disama artikan dengan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam melakukan kegiatan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Salah satu cara untuk melihat hasil pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat disama artikan dengan melakukan analisis tingkat terhadap APBD yang telah diimplementasikan dan dilaksakannya. Hasil analisis tingkat keuangan ini setelahnya digunakan sebagai tolak ukur, salah satunya dapat disama artikan dengan mengukur

efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah dan mengukur sumbangan masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Pemasukan Pendapatan Asli Provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 6.592.642.996.631,7,-. Dan juga dilihat dari sumber-sumber Dana Perimbangan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2018. Dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya dan sumbangannya pun berada dalam angka positif.

Pada penjelasan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalahnya yang berupa, Bagaimana tingkat efektivitas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari tahun 2014-2018 ? dan Bagaimana kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari tahun 2014-2018 ?. Rumusan masalah tersebut berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2018-2014.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kontribusi**

Kontribusi dapat disama artikan dengan sumbangan yang diserahkan sebuah lembaga atau non-lembaga sebagai usaha membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang diperlukan. Maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diserahkan oleh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Efektivitas**

Efektivitas dapat disama artikan dengan tingkatan berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai target atau sasarannya. Apabila suatu lembaga atau non-lembaga berhasil mencapai target atau sasaran, maka lembaga atau non-lembaga tersebut dikatakan telah berjalan semetode efektif. Efektivitas dapat disama artikan dengan mengukur rentang keberhasilan antara hasil Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan daerah dapat disama artikan dengan seluruh pemasukan dana yang merupakan kewenangan daerah dan ditetapkan sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam rentang waktu tahun suatu dana yang disediakan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan dapat dianggap sebagai salah satu inti dari pendapatan daerah yang lahir dari APBN untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dalam mencapai target atau sasaran pemberian otonomi kepada daerah, yaitu salah satunya mengoptimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin lebih baik dan efektif serta pemanfaatan sumber daya alam. Dana Perimbangan di bagi menjadi tiga yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD dapat dianggap sebagai alat kebijakan yang pital bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai peralatan untuk menunjukkan skala pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, estimasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar pengulasan kinerja, alat bantu untuk memotivasi para perangkat kerja, dan alat untuk berdiskusi bagi seluruh aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan Pemendagri No. 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat disama artikan dengan rencana keuangan setiap tahun pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), dan diimplementasikan dengan peraturan daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Rima Adelina,2011) menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007 -2011 berada dalam kondisi efektif dengan tingkat presentase melebihi 100%, sedangkan tingkat kontribusi menunjukkan kondisi sangat kurang dengan tingkat presentase kurang dari 10%.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Juliawati, dkk, 2012) memperlihatkan kondisi parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (W. Adawiyah, I.C Kusuma, 2015) memperlihatkan kontribusi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2006-2010 dengan hasil rata-rata pertahun 13,55% untuk PAD dan 75,53% untuk Dana Perimbangan. Untuk tingkat efektivitas 2010-2016 memperlihatkan hasil yang sangat efektif dengan pencapaian realisasi yang melebihi target yang telah ditentukan.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Decta Pitron Lugastoro, 2016) menunjukkan rasio PAD dan DAK terhadap Belanja Modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Rasio DAU terhadap Belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio DBH terhadap Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh (Mohammad Riduansyah, 2016) menyatakan kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini dikarenakan berubahnya peraturan perundang-undangan dalam rentang waktu tahun anggaran 1993/1994-2000, dan terakhir berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yang menggambarkan dan menguraikan masalah dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan dijabarkan dan diamati.

Lokasi Penelitian ini berfokus pada Provinsi Kalimantan selatan dengan pertimbangan melihat potensi daerah tersebut.

### **Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang dimana data yang diperoleh dari catatan, buku atau majalah berupa laporan keuangan publikasi pemerintah maupun suatu perusahaan, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

### **Objek Penelitian**

Tempat/lokasi penelitian disini ialah Dinas Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Teknik Analisis Data**

Rumus yang dipakai untuk melihat sumbangan dapat disama artikan dengan sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Dimana :

$P_n$  = Sumbangan Penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah),

$QY$  = Jumlah Penerimaan APBD (Rupiah),

$QX$  = Jumlah Komponen penerimaan PAD/ Dana Perimbangan (Rupiah),

$n$  = Tahun

Untuk melihat besarnya sumbangan PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD dapat diinterpretasikan pada kategori yang dikeluarkan oleh litbang Depdagri Fisipol UGM sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Interprestasi Nilai Sumbangan**

<b>Kriteria</b>	<b>Rasio Sumbangan (%)</b>
<b>Sangat Kurang</b>	0,00 – 10,00
<b>Kurang</b>	10,00 – 20,00
<b>Sedang</b>	20,00 – 30,00
<b>Cukup</b>	30,10 – 40,00
<b>Baik</b>	40,10 – 50,00
<b>Sangat Baik</b>	> 50,00

Sumber: Syamni dan Martunis (2013)

Rumus pengukuran efektivitas untuk penerimaan sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan dapat disama artikan dengan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Sumber} - \text{Sumber PAD dan Dana Perimbangan}}{\text{Target Sumber} - \text{Sumber PAD dan Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri Nomor 709.900.327 Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom kedalam lima tingkat efektivitas sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Efektivitas Keuangan Daerah Otonom**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Depdagri,. Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 (Syamni dan Martunis 2013)

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 3**  
**Total APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018**

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan	Total
<b>2014</b>	4,793,164,631,015.94	4,917,827,639,756.94	746,044,087,670.66	5,539,208,718,686.60
<b>2015</b>	4,746,943,175,618.91	5,102,865,250,356.48	737,981,195,295.66	5,484,924,370,914.57
<b>2016</b>	5,218,654,285,851.63	5,178,766,888,168.00	357,369,805,905.09	5,576,024,091,756.72
<b>2017</b>	5,604,988,173,755.66	5,865,576,340,533.18	366,355,185,929.72	5,971,343,359,685.38
<b>2018</b>	6,592,642,996,631.70	6,082,587,192,592.21	130,243,835,036.00	6,722,886,831,667.70

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Pada Tabel 3 bisa dilihat bahwa jumlah pendapatan terendah ada pada tahun 2015 sebesar 4,746,943,175,618.91 Triliun, dan yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6,592,642,996,631.70 Triliun. Dan untuk jumlah belanja terendah ada pada tahun 2014 sebesar 4,793,164,631,015.94 Triliun, dan yang tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 6,082,587,192,592.21 Triliun. Dan untuk jumlah pembiayaan terendah berada pada tahun 2018 sebesar 130,243,835,036.00 Triliun, dan yang tertinggi berada pada tahun 2014 sebesar

746,044,087,670.66 Triliun. Dan untuk total APBD Provinsi Kalimantan Selatan terendah berada pada tahun 2015 sebesar 5,484,924,370,914.57 Triliun, dan yang tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 6,722,886,831,667.70 Triliun.

### **Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 4**  
**Target dan Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Surplus/(Defisit)</b>
<b>2014</b>	2,875,793,953,000.00	2,898,704,954,479.94	22,911,001,479.94
<b>2015</b>	2,934,170,710,000.00	2,684,908,313,880.91	(249,262,396,119.09)
<b>2016</b>	2,484,662,708,000.00	2,500,073,656,773.63	15,410,948,773.63
<b>2017</b>	3,223,293,983,408.00	2,848,892,104,718.66	(374,401,878,689.34)
<b>2018</b>	3,538,479,935,579.00	3,557,316,628,829.70	18,836,693,250.70

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020.

Pada Table 4 dapat dilihat pada tahun 2014 dengan target 2,875,793,953,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,898,704,954,479.94 Triliun, menunjukkan kondisi surplus sebesar 22,911,001,479.94 Miliar. Pada tahun 2015 pemerintah menaikkan target sebesar 2,934,170,710,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,684,908,313,880.91 Triliun, hal ini menunjukkan kondisi defisit sebesar 249,262,396,119.09 Miliar. Pada tahun 2016 pemerintah menurunkan target sebesar 2,484,662,708,000.00 Triliun dengan realisasi 2,500,073,656,773.63 Triliun, hal ini menghasilkan kondisi surplus sebesar 15,410,948,773.63 Miliar. Pada tahun 2017 pemerintah menaikkan target sebesar 3,223,293,983,408.00 Triliun dengan realisasi 2,848,892,104,718.66 Triliun, hal ini menghasilkan kondisi defisit sebesar 374,401,878,689.34 Miliar. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan target kembali sebesar 3,538,479,935,579.00 Triliun dengan realisasi sebesar 3,557,316,628,829.70 Triliun, hal ini menunjukkan kondisi surplus 18,836,693,250.70 Miliar.

### **Dana Perimbangan**

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2014-2018**



Tahun	Target	Realisasi	Surplus/(Defisit)
2014	1,865,960,491,500.00	1,858,359,631,211.00	(7,600,860,289.00)
2015	1,925,562,398,000.00	2,026,632,226,339.00	160,671,734,839.00
2016	2,648,678,465,300.00	2,682,349,255,301.00	33,670,790.001.00
2017	2,751,023,025,000.00	2,712,223,930,644.00	(38,799,094,356.00)
2018	2,842,354,854,916.00	2,842,354,854,916.00	144,334,896,747.00

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Pada Table 5 dapat dilihat pada tahun 2014 memiliki target sebesar 1,865,960,491,500.00 Triliun dengan realisasi sebesar 1,858,359,631,211.00 Triliun, menghasilkan kondisi defisit sebesar 7,600,860,289.00 Miliar. Pada tahun 2015 pemerintah menaikkan target sebesar 1,925,562,398,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,026,632,226,339.00 Triliun, menghasilkan kondisi surplus sebesar 160,671,734,839.00 Miliar. Pada tahun 2016 pemerintah menaikkan target sebesar 2,648,678,465,300.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,682,349,255,301.00 Triliun, menghasilkan kondisi surplus 33,670,790.001.00 Miliar. Pada tahun 2017 pemerintah menaikkan target sebesar 2,751,023,025,000.00 Triliun dengan realisasi sebesar 2,712,223,930,644.00 Triliun, menghasilkan kondisi defisit sebesar 38,799,094,356.00 Miliar. Pada tahun 2018 pemerintah menaikkan target sebesar 2,842,354,854,916.00 Miliar dengan target sebesar 2,842,354,854,916.00 Triliun, menghasilkan kondisi surplus sebesar 144,334,896,747.00 Miliar.

### Hasil Pembahasan dan Analisis Data

#### Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

**Tabel 6**  
**Sumbangan PAD terhadap APBD**

Tahun	PAD	APBD	Sumbangan (%)	Kriteria
2014	2,898,704,954,479.94	5,539,208,718,686.60	52.33	SANGAT BAIK
2015	2,684,908,313,880.91	5,484,924,370,914.57	48.95	BAIK
2016	2,500,073,656,773.63	5,576,024,091,756.72	44.84	BAIK
2017	2,848,892,104,718.66	5,971,343,359,685.38	47.71	BAIK
2018	3,557,316,628,829.70	6,722,886,831,667.70	52.91	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Pengolahan 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas, sumbangan PAD terhadap APBD menunjukkan kisaran 44.84 - 52.91 persen dan rata-rata per tahunnya sebesar 49.35 persen yang masuk di dalam kategori BAIK dalam jangka tahun 2014 – 2018. Kondisi sumbangan PAD terhadap APBD mengalami fluktuasi namun dilihat dari jenis kriteria menunjukkan rata-rata kriteria BAIK dan SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dana PAD ke program-program prioritas untuk memajukan pembangunan daerah seperti program infrastruktur untuk mempermudah dan meningkatkan ekonomi daerah.

Sumber-sumber penerimaan sumbangan PAD terhadap APBD berasal dari penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD

**Tabel 7**  
**Sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD**

Tahun	Dana Perimbangan	APBD	Sumbangan (%)	Kriteria
2014	1,858,359,631,211.00	5,539,208,718,686.60	33.55	CUKUP
2015	2,026,632,226,339.00	5,484,924,370,914.57	36.95	CUKUP
2016	2,682,349,255,301.00	5,576,024,091,756.72	48.11	BAIK
2017	2,712,223,930,644.00	5,971,343,359,685.38	45.42	BAIK
2018	2,842,354,854,916.00	6,722,886,831,667.70	44.43	BAIK

Sumber : Hasil Pengolahan 2020

Dapat dilihat pada tabel 8 diatas, sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD menunjukkan kisaran 33.55 – 48.11 persen dengan rata-rata per tahunnya sebesar 41.69 persen dan masuk dalam kategori CUKUP pada tahun 2014-2015 dan kategori BAIK pada tahun 2016-2018. Kondisi sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD berjalan fluktuatif tetapi mengalami kenaikan angka nominal dalam setiap tahunnya. Hal ini sebenarnya menunjukkan tidak sejalannya dengan kegiatan otomoni daerah yang tidak menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan di daerahnya. Pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak menunjukkan kontribusi per tahunnya sebesar 14,85

persen dengan kriteria kurang, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang menggali potensi daerahnya untuk memajukan sumber pendapatan yang berasal dari pajak maupun non-pajak (SDA) demi terciptanya pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil bersumber dari Hasil Pajak yang berupa Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari hasil sumber daya alam yang berupa Hasil Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak dan Gas, Panas Bumi dan Perikanan. Pada Dana Alokasi Umum menunjukkan kontribusi per tahunnya sebesar 14,45 persen. Walaupun berada pada kondisi kriteria Kurang, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan sudah mencerminkan kemandirian dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Pada Dana Alokasi Khusus menunjukkan kontribusi setiap tahunnya sebesar 9,52 persen dengan kriteria Kurang, walaupun Kontribusi Dana Alokasi Khusus menunjukkan kriteria Sangat Kurang, sebenarnya hal ini menggambarkan kondisi dimana pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan telah mandiri dalam kegiatan otonomi daerah dengan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini pula membuktikan bahwa pemerintah daerah telah mampu membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik.

### **Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Tabel 8**  
**Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2014</b>	2,875,793,953,000.00	2,898,704,954,479.94	100.80	<b>SANGAT EFEKTIF</b>
<b>2015</b>	2,934,170,710,000.00	2,684,908,313,880.91	91.50	<b>EFEKTIF</b>
<b>2016</b>	2,484,662,708,000.00	2,500,073,656,773.63	100.62	<b>SANGAT EFEKTIF</b>
<b>2017</b>	3,223,293,983,408.00	2,848,892,104,718.66	88.38	<b>CUKUP EFEKTIF</b>

---

<b>2018</b>	3,538,479,935,579.00	3,557,316,628,829.70	100.53	<b>SANGAT EFEKTIF</b>
-------------	----------------------	----------------------	--------	---------------------------

---

Sumber : Hasil Pengolahan 2020

Dapat dilihat pada Tabel 9 diatas, efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun 2014 – 2018 berkisar 88.38 – 100.80 persen dengan rata-rata per tahun 96.37 dan masuk dalam kategori efektif. Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa dana penerimaan PAD mengalami kenaikan dan masuk dalam ketegori efektif setiap tahunnya yang berarti penerimaan realisasi melebihi target anggaran yang disediakan dan hal ini disebabkan oleh sumbangan dari pendapatan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pendapatan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan membuktikan bahwa PAD Provinsi Kalimantan Selatan bekerja produktif dan mencapai kemandirian. Walaupun di beberapa tahun yang bersangkutan dari angka nominal ataupun persentase efektivitas mengalami kondisi fluktuasi seperti tahun 2015 dan 2017 yang mengalami penurunan.

### Efektivitas Dana Perimbangan

**Tabel 9**  
**Efektivitas Dana Perimbangan**

<b>Tahun</b>	<b>Target Dana Perimbangan</b>	<b>Realisasi Dana Perimbangan</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2014</b>	1,865,960,491,500.00	1,858,359,631,211.00	99.59	<b>EFEKTIF</b>
<b>2015</b>	1,925,562,398,000.00	2,026,632,226,339.00	105.25	<b>SANGAT EFEKTIF</b>
<b>2016</b>	2,648,678,465,300.00	2,682,349,255,301.00	101.27	<b>SANGAT EFEKTIF</b>
<b>2017</b>	2,751,023,025,000.00	2,712,223,930,644.00	98.59	<b>EFEKTIF</b>
<b>2018</b>	2,842,354,854,916.00	2,986,689,751,663.00	105.08	<b>SANGAT EFEKTIF</b>

---

Sumber : Hasil Pengolahan 2020

Dapat dilihat pada Tabel 10 diatas, efektivitas Dana Parimbangan berkisar 98,59 – 105.25 persen dengan rata-rata per tahunnya sebesar 101,96 persen yang masuk dalam kriteria sangat efektif. Walaupun dalam tahun tertentu yaitu tahun 2014 dan 2017 masuk dalam kriteria efektif sedangkan pada tahun 2015, 2016 dan 2018 masuk dalam kriteria

sangat efektif, hal ini sudah menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan sudah mandiri mengembangkan potensi daerahnya dalam mengelola sumber daya sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah. Dana transfer daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian).

## **PENUTUP**

### **Keterbatasan Penelitian**

Data yang disediakan pada dinas terkait kurang lengkap dikarenakan sebagian data sudah dibukukan sehingga peneliti mengambil data dengan cara mendokumentasikan melalui handphone berupa foto.

### **Kesimpulan**

Sumbangan PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar sebesar 44.84 - 52.95 persen dengan rata-rata pertahunnya sebesar 49,35 dengan kategori BAIK. Kondisi Sumbangan PAD mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2018, namun kondisi ini tetap menunjukkan kondisi kriteria SANGAT BAIK dan BAIK. Kondisi ini didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memajukan dan meningkatkan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Sumbangan Dana Perimbangan terhadap APBD dari tahun 2014-2018, berkisar 33.55-48.11 persen dengan rata-rata pertahunnya sebesar 41.69 persen dengan kategori CUKUP. Kondisi Dana Perimbangan dalam tahun 2014-2018 berjalan fluktuatif tetapi mengalami kenaikan angka nominal setiap tahunnya yang pada awalnya berada pada kondisi CUKUP menjadi kondisi BAIK. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Dana Transfer Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian). Hal ini sebenarnya menunjukkan tidak sejalannya dengan kegiatan otomoni daerah yang tidak menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan di daerahnya.

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018, berkisar 88.38-100,80 persen dan rata-rata pertahunnya 86.37 persen dengan kategori EFEKTIF. Kondisi efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjalan fluktuatif di beberapa tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2017, tetapi di tahun lainnya cenderung mengalami kenaikan angka nominal realisasi yang melebihi target anggaran. Hal ini disebabkan oleh sumbangan dari pendapatan hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pendapatan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tingkat Efektivitas Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014-2018, berkisar 98.59-105.25 persen dan rata-rata pertahunnya sebesar 101,96 persen dengan kategori SANGAT EFEKTIF. Kondisi dana perimbangan mengalami fluktuatif di beberapa tahun dari segi nominal tingkat pencapaian target dan realisasi, tetapi kondisi kriteria efektivitas cenderung menunjukkan kriteria EFEKTIF dan SANGAT EFEKTIF. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemandirian Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan potensi daerah dan mengelola sumber daya. Pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berkisar 98,94 - 125,24 persen dengan rata-rata efektivitas per tahunnya sebesar 109,96 persen dengan kategori Sangat Efektif. Walaupun berjalan fluktuatif, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun yang bersangkutan selalu mencapai angka realisasi yang melebihi dari target yang ditetapkan, dikarenakan pemerintah daerah telah bekerja secara optimal dengan memajukan potensi sumber daya alam dan sektor pajak di daerah provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa sektor yang sangat berperan dalam penambahan nilai pendapatan di daerah provinsi Kalimantan Selatan ialah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Hasil Kehutanan dan Hasil Mineral dan Batu Bara.

### **Saran**

Untuk pemerintah perlu memperhatikan serta meningkatkan sektor-sektor industri yang menjadi faktor pemicu penambahan nilai pendapatan, seperti sektor pajak dan sumber daya alam (khususnya bidang pertambangan dan hasil hutan) guna menciptakan peningkatan pendapatan daerah sehingga Kontribusi dan tingkat efektivitas yang diberikan oleh PAD dan Dana Perimbangan dapat berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat secara merata dan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat demi

terciptanya pemerintahan yang mandiri dan demi terciptanya kegiatan desentralisasi yang baik dan ideal.

Untuk masyarakat melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat wajib pajak dengan membayar pungutan pajak seperti pajak kendaraan bermotor dan lain-lain pajak yang tertera, demi meningkatkan pendapatan asli daerah dan terciptanya pembangunan daerah. Masyarakat juga ikut andil dalam pemeliharaan sumber daya alam sebagai pemantau kegiatan pemerintah dalam peningkatan hasil sumber daya alam agar tidak terciptanya hal yang tidak diinginkan seperti eksploitasi yang berlebihan.

### **Bibliography**

- Bogdan, Robert, dan Taylor. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiyuwono, Nugroho. 2016. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Darise, Nurlan. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Djaenuri, Aries. 2017. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Guritno, T. 2015. *Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul, dan Theresia Damayanti. 2017. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2017. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Narimawati, Umi, Sri Dewi, dan Lina Ismawati. 2016. *Penulisan Karya Ilmiah : Panduan Awal menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis.
- Syamni, Ghazali, dan Martunis. 2013. *Pengaruh OPM, ROE dan ROA Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia*. Vol. 2. Jurnal Kebangsaan.
- Yuwono, Sonny. 2017. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Adelina, R. (2011). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Banungan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*.

- Julita Wati, D. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.*
- Lugastoro, D. P. (2016). *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Timur.*
- Riduansyah, M. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Bogor).*
- W. Adawiyah, I. K. (2015). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.*